



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

INTEGRASI ANTARMODA LRT-KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

Suhartono

Analisis Kebijakan Madya
suhartono2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Jokowi telah meresmikan penggunaan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek untuk publik dan melakukan uji coba publik Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). LRT dan KCJB menambah moda transportasi yang dibiayai oleh APBN, semula hanya dilayani oleh lokomotif diesel, Kereta Rel Listrik (KRL), dan MRT. Peresmian moda LRT dan KCJB menandai transformasi moda transportasi publik kini berbasis rel, berenergi listrik, rendah polusi, dan berteknologi maju. Transformasi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui transportasi massal perkotaan. Tujuannya untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat berdampak pada penurunan tingkat kemacetan, menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM), dan mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir yang sempat mencapai rata-rata 139 US AQI menurut IQAir.

Keberhasilan transformasi transportasi massal berbasis rel membutuhkan dukungan perubahan gaya hidup masyarakat yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dukungan masyarakat yang beralih ke transportasi massal akan terjadi saat transportasi publik memberikan kemudahan, kenyamanan, keterjangkauan dan keamanan. Salah satunya melalui adanya integrasi antarmoda transportasi publik yang dapat melayani masyarakat pengguna dari tempat tinggal ke tujuan. Kualitas antarmoda transportasi tersebut seharusnya sama baik dan mudah dengan kualitas layanan LRT atau MRT. Integrasi antarmoda membutuhkan dukungan infrastruktur, manajemen lalu lintas di sekitar stasiun, dan kolaborasi dengan sejumlah pengelola perumahan dalam menyediakan titik berangkat dan akses transportasi pengumpan dari dan menuju stasiun kereta. Tantangan integrasi antarmoda terletak pada tata kelola kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI, dan pemerintah daerah.

Selain membuat kebijakan, Kemenhub terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sejumlah infrastruktur stasiun dan rel. PT KAI bertanggung jawab mengoperasikan stasiun dan layanan kereta. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan dan membangun infrastruktur penghubung, serta menyediakan sejumlah moda dari dan ke stasiun menuju tujuan.

Integrasi antarmoda dengan layanan LRT dan KCJB memerlukan kerjasama di antara pemangku kepentingan dalam membangun akses agar angkutan penumpang atau kendaraan pengantar dapat menjangkau layanan stasiun dengan baik. Kegagalan dalam membangun integrasi antarmoda akan menekan minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan rendahnya jumlah penumpang dari LRT, MRT dan KCJB. Untuk itu, diperlukan dukungan transportasi pengumpan yang dapat menarik calon pengguna LRT di stasiun di kawasan Bodetabek.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

Atensi DPR

Pengoperasian LRT Jabodebek dan uji coba KCJB menandai transformasi moda transportasi dengan teknologi maju dan lebih ramah lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan kebijakan pembangunan integrasi dengan moda pengumpan. Rendahnya animo masyarakat menggunakan moda LRT disebabkan oleh belum adanya integrasi antarmoda di sejumlah stasiun. Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung LRT dan KCJB yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kemenhub, operator stasiun LRT, dan pemerintah daerah untuk menyediakan akses moda pengumpan, memperbaiki manajemen lalu lintas perjalanan moda pengumpan dari dan ke stasiun, serta meningkatkan kualitas infrastruktur. Komisi V DPR RI dapat mendorong pemerintah agar mensosialisasikan kemanfaatan moda transportasi baru dan integrasi sistem *bundling* atas tarif KCJB dengan LRT Jabodebek.

Sumber

Kompas, 13 dan 14 September 2023; dan
Media Indonesia, 12 September 2023.